

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Jesita Aprilia (2022. hlm 2) kaum perempuan merupakan salah satu bagian dari kaum rentan. Kaum perempuan desa adalah komponen kelompok warga desa yang rentan dipinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat yang membentuk dan memposisikan perempuan adalah masyarakat nomor dua. Eksistensi perempuan mencoba untuk menjalankan peranan publik melalui partisipasi. Namun, tetap saja kebanyakan hanya ditempatkan sebagai formalitas belaka. Bahkan, pekerjaan perempuan seringkali dikategorikan sebagai “pekerjaan gratis”. Artinya, pekerjaan yang tidak bernilai atau kurang bernilai secara finansial. Pekerjaan ini lebih bersifat pekerjaan mengasuh, melayani masyarakat, pekerjaan pembantu rumah tangga dan sebagainya.

Beberapa ahli studi perempuan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan posisi tawar perempuan adalah melalui pengorganisasian. Hal ini sejalan dengan anjuran yang disampaikan oleh penganut paham strukturalisradikalis. Menurut Sutoro Eko dalam (Jesita Aprilia, 2022. hlm 4) penganut paham strukturalis-radikalis memandang bahwa desa adalah situs ketimpangan, penindasan, penghisapan elit terhadap kaum proletarat. Oleh karena itu, untuk merubah desa, maka mereka mengusung ide yaitu mendidik dan mengorganisir rakyat . Pengorganisasian dianggap sebagai langkah paling konkret untuk dapat memberdayakan masyarakat (terutama perempuan) itu secara lebih baik. Salah satu organisasi yang berikhtiar untuk memberdayakan kaum perempuan di desa adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

PKK bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan dapat membina keluarganya. PKK adalah gerakan pembangunan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sebagai sebuah organisasi, PKK diharapkan menjadi wadah potensil dan motor penggerak pembangunan khususnya

dalam hal pemberdayaan keluarga. Menurut Nurdewanto dkk dalam (W Permatasari, 2017. hlm 101) singkatnya, PKK adalah sebuah organisasi yang berbasis pada keluarga yang dapat digunakan ujung tombak pembangunan. Menurut Arisandi dalam (Alvianta, 2021. hlm 137) PKK merupakan organisasi masyarakat yang diperuntukkan bagi kaum perempuan agar dapat mengembangkan dirinya di dalam masyarakat.

Menurut (Kementerian Dalam Negeri. 2013), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) didefinisikan sebagai gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Menurut Nurhayati (2018. hlm 154) konsep Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu sebuah organisasi yang melibatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-program pemerintah. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan dengan program-program pemerintah.

PKK yang merekrut anggota sampai lapisan bawah masyarakat diharapkan mampu membawa pada kondisi keluarga yang sejahtera, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia baik secara material, sosial, mental dan spiritual serta keluarga yang berdaya yaitu keluarga yang hidup sejahtera, maju dan mandiri. Selain itu, PKK diharapkan mampu membebaskan perempuan dari belenggu budaya patriarki, sehingga memiliki kemandirian. Melalui PKK diharapkan harkat dan martabat perempuan sebagai bagian dari keluarga dapat

ditingkatkan. Namun, pada kenyataannya PKK belum sepenuhnya mampu merubah kondisi keluarga dan perempuan, sehingga belum terwujud kesetaraan dan keadilan gender.

Narwoko & Suyanto (2004) dalam (Febriyanti, 2022. hlm 2) mendefinisikan stereotip sebagai pelabelan pada suatu pihak atau kelompok tertentu dapat berujung pada kerugian salah satu pihak sehingga dapat memunculkan ketidakadilan. Stereotip yang terbangun merupakan sebuah doktrinisasi yang mengkonstruksi pemikiran dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, yang dilakukan melalui proses sosialisasi baik oleh keluarga maupun lingkungannya. Menurut Riswani (2015) dalam (Widyani, 2022. hlm 114) stereotip gender merupakan sebuah cara pandang suatu masyarakat yang selalu menempatkan entitas hierarki dalam sebuah hubungan.

Wrightdmrn dalam (Anggola, 2024. hlm 534) menyebutkan bahwa stereotip gender merupakan generalisasi pengharapan mengenai aktivitas kemampuan atribut dan pilihan yang sesuai jenis kelamin seseorang. Hoyenga dalam (Riswani, 2015. hlm 230) menjelaskan bahwa gender merupakan hasil dari pengkategorian perempuan dan laki-laki di dunia sosial. Menurut murniati (2004) dalam (Rahmadhani, 2020. hlm 218), stereotip gender muncul dari adanya pemikiran secara psikologi akibat perbedaan seks perempuan dan laki-laki. Stereotip gender adalah sebuah keyakinan yang berkaitan dengan perilaku yang membedakan perempuan dan laki-laki. Keyakinan tersebut berupa pelabelan yang sudah lama terbentuk dalam kehidupan masyarakat

Sakina dan Siti (2017. hlm 72) menegaskan bahwa "stereotip gender tidak hanya membatasi pilihan dan kesempatan bagi perempuan, tetapi juga berdampak negatif pada laki-laki dengan memaksakan ekspektasi sosial yang kaku". Eagly dan Wood (2012. hlm 458) dalam teori peran sosial mereka menegaskan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan berasal dari pembagian kerja yang berbeda dalam masyarakat, bukan semata-mata dari faktor biologis. Teori ini menyoroti pentingnya mengubah struktur sosial dan ekspektasi peran untuk mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah suatu

konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotip, prasangka, dan peran gender yang kaku (Qamariah, 2019. hlm 53).

Kesetaraan gender di Indonesia mulai diprogramkan pada saat ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, artinya pemahaman terhadap kesetaraan gender di masyarakat mulai dibangun pada tahun 2000-an. Namun tidak semua masyarakat memahami makna dari kesetaraan gender sehingga pelaksanaan kesetaraan gender didalam keluarga dirasa masih jauh dari harapan. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian mendalam untuk mengeksplorasi sejauhmana persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender di dalam keluarga.

Dalam konteks ini, PKK memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perubahan struktural ini melalui program-program dan intervensi sosialnya. Lebih lanjut, penelitian ini relevan dengan konteks kebijakan nasional Indonesia yang menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menegaskan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahap dan proses pembangunan.

Dalam kerangka ini, PKK sebagai organisasi yang memiliki jangkauan luas hingga ke tingkat rumah tangga memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Ciamis No.18 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (6) dan (8) tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Kabupaten Ciamis. 2022. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia sebesar 0,447 turun sebanyak 0,012 poin dibandingkan sebelumnya yang sebesar 0,459. Penurunan sebesar 0,012 poin tahun ini sedikit lebih kecil dibandingkan penurunan IKG pada 2020, yaitu sebesar 0,016 poin. Selain itu, penurunan IKG Indonesia pada tahun 2023 ini melanjutkan perbaikan yang telah dicapai sejak 2019. Dengan demikian, selama lima tahun terakhir, IKG Indonesia secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sejak 2018, IKG Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,010 poin per tahun sehingga totalnya mencapai 0,052 poin selama lima tahun terakhir.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika upaya kader PKK dalam upaya mengatasi stereotip gender di masyarakat Desa Langkapsari. Peneliti dalam prosesnya menggunakan teori Peran Sosial (*Social Role Theory*) yang dikemukakan oleh Alice H. Eagly dan Wendy Wood. Teori ini sangat relevan karena berfokus pada bagaimana peran sosial membentuk dan mempengaruhi stereotip gender, serta bagaimana perubahan peran dapat mengatasi stereotip tersebut. Menurut (Eagly, A. H., & Wood, W, 2012 : 464) dalam teori peran sosial ini akan mengkaji secara mendalam melalui 5 indikator yaitu Pembagian Peran Sosial (*Division of Social Roles*), Ekspektasi Perilaku Berbasis Gender (*Gender-Based Behavioral Expectations*), Sosialisasi Peran Gender (*Gender Role Socialization*), Fleksibilitas Peran Gender (*Gender*

Role Flexibility), Perubahan Sosial dan Peran Gender (*Social Change and Gender Roles*).

Peneliti menggunakan teori tersebut dikarenakan berfokus pada peran sosial yang relevan dengan peran kader PKK dalam masyarakat. Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan sebuah permasalahan yakni kader PKK belum bisa mengentaskan budaya patriarki yang masih mengakar pada kehidupan sosial masyarakat di Desa Langkapsari menjadikan penelitian ini memiliki relevansi yang baik. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan program yang lebih efektif dalam memberdayakan kader PKK sebagai agen perubahan gender di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada literatur akademik tentang strategi mempromosikan kesetaraan gender. Dengan mempertimbangkan kompleksitas isu stereotip gender dan potensi strategis PKK dalam masyarakat Indonesia khususnya kader PKK Desa Langkapsari, penelitian tentang "**Upaya Kader PKK Dalam Mengatasi Stereotip Gender di Lingkungan Masyarakat**" menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian ini tidak hanya akan mengisi kesenjangan pengetahuan dalam literatur akademik, tetapi juga dapat memberikan implikasi praktis yang signifikan bagi upaya pencapaian kesetaraan gender di Desa Langkapsari.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 2.1. Masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai gender di masyarakat Desa Langkapsari.
- 2.2. Masih terbatasnya program PKK dalam mengatasi stereotip gender.
- 2.3. Upaya yang dilakukan kader PKK masih sebatas penyuluhan yang tidak berkelanjutan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana upaya kader PKK di Desa Langkapsari,

Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis dalam mengatasi stereotip gender di lingkungan masyarakat?.”

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui upaya kader PKK di Desa Langkapsari, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis dalam mengatasi stereotip gender di lingkungan masyarakat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak dampak manfaat dan kegunaan sesuai yang diharapkan oleh peneliti, demikian beberapa kegunaan penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kader PKK Desa Langkapsari, Kecamatan Banjaranyar mengenai stereotip gender di masyarakat serta pentingnya kesetaraan gender.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi cakrawala pengetahuan mengenai Upaya Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mengatasi Stereotip Gender di Lingkungan Masyarakat.

1.5.2.2 Bagi PKK Desa Langkapsari

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi PKK Desa Langkapsari agar kedepannya organisasi PKK khususnya para kader di dalamnya mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai stereotip gender agar terciptanya kesetaraan gender di masyarakat.

1.5.2.3 Bagi Universitas Siliwangi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan penelitian dalam bidang pendidikan khususnya mengenai Upaya Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mengatasi Stereotip Gender di Lingkungan Masyarakat.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat dan membuat mereka menjadi berdaya atau memiliki kemampuan untuk memiliki kehidupan yang jauh lebih baik.

1.6.2 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu sebuah organisasi yang melibatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera. PKK juga diharapkan mampu membebaskan perempuan dari belenggu budaya patriarkhi yang sudah cukup mengakar dikalangan masyarakat umum, sehingga para kader PKK memiliki kemandirian.

1.6.3 Stereotip Gender

Stereotip gender merupakan sebuah persepsi sosial dimana pembagian peran sosial yang didasarkan pada faktor biologis saja yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadi sebuah permasalahan sosial dimana budaya patriarki menjadi semakin mengakar sehingga tercapainya sebuah kesetaraan gender dimasyarakat semakin sulit untuk bisa tercipta.